

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya, 2004.
- Budi Untung. Kredit Perbankan di Indonesia. Ed. II. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2000.
- Azikin, Zainal. Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta: Kencana), 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Fajar, Mukti. Achmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 2023.
- Frieda Husni Hasbullah. Hukum Kebendaan Perdata Hak Hak Yang Memberi Jaminan. (Jilid 2, Cet 3). Jakarta: Indo Hill-Co. 2009.
- Fuady, Munir. 1999. Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, (Jakarta: Bumi Aksara). 2018.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika). 2019.
- Hotman P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Erlangga, Jakarta: 2010
- Jimly asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali pers. 2010
- Kartini Mulyadi. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepailitan atau PKPU. Bandung: Penerbit Alumni. 2001
- Kartono. Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran. Jakarta: Pradya Pramita. 1974.
- Lontoh, A. Rudhi, et.al. Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung: Alumi. 2001.
- Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta: 1998
- Mertokusumo, Sudikno, et A. Pitlo, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Jakarta: Penerbit Citra Aditya.
- Moh Nazir, Penelitian Metode, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

- M. Bahsan. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia (Ed. 1, Cet. 3). Jakarta: Rajawali. 2010.
- Mulyadi, Kartini. Hukum Kepailitan. Jakarta: Putra Grafika. 2007.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2002.
- R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Sastrawidjaja, S. Man.Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bandung. 2010.
- Sidabutar, E.S., 2004. Pedoman Penyelesaian PHK. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Subhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik di Peradilan.
- Sutan Remy Sjahdeini. Hukum Kepailitan. (Jakarta: PT Pustaka Grafiti). 2020.
- Yulianto, Pengantar Hukum Kepailitan Teori dan Praktek, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), 2023.
- Wibisono, Putut dkk. Problematika Hukum Formil Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia. (Banyumas: CV Arta Media), 2023.

Jurnal

- Fitasari, F. (2020). Keabsahan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Buruh Tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. *Juris-Diction*, 3(3), 971. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18633>
- Hartono,Redjeki,Sri. 1999.Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern.Jakarta:Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Imanuel W. Nalle, Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan kebijakan kajian putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009, *Jurnal Yudisial* vol 6.
- Makmur, S. (2016). Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitor pada Pengadilan Niaga Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2)
- Saputra, I. E. (2020). Kedudukan Hukum Kreditor Preferen Pajak dan Kreditor Preferen Buruh dalam Proses Kepailitan. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 155-166.

Shubhan, M.H. (2020). Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 519-539.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 mengatur tentang Penyelesaian Pembayaran Upah Buruh.

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.